

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut merupakan profil Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang informasinya didapat pada *website* resminya yakni syariah.iain-antasari.ac.id.

##### a. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Cikal bakal Fakultas Syariah diawali pada tahun 1958, ketika di Banjarmasin berdiri Fakultas Agama Islam di bawah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang resmi berdiri pada tanggal 21 September 1958. Ketuanya dijabat oleh H. Abdurrahman Ismail, MA dan H. Mastur Jahri, MA sebagai sekretaris. Setahun kemudian, pada tahun 1959, Fakultas Agama Islam ini berubah menjadi Fakultas Islamologi dan masih tetap di bawah Unlam. Pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin yang diketuai oleh K.H. Abdurrahman Ismail, MA. Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah, Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin mengutus H.M. Daud Yahya dan Abdurrivai, BA untuk menghadap Menteri Agama K.H.M. Wahib Wahab di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh.

Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun

1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H.M. Wahib Wahab diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin. Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Sebagai Dekannya ditetapkan KH. Abdurrahman Ismail, MA.

Walaupun Fakultas Islamologi Banjarmasin telah dinegerikan menjadi Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum belum sepenuhnya terpenuhi. Pada tanggal 20 September 1961 didirikan sebuah Universitas Islam Antasari (Unisan) yang merupakan gabungan Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Syariah di Kandangan dan pada Tahun 1962 ditambah fakultas baru, yaitu Fakultas Publisistik di Banjarmasin. Pengumuman berdirinya Unisan dibacakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Maksid, pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwiwarna Barabai pada peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-13.

Adanya Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin dan berdirinya Unisan sebagai modal utama untuk mendirikan IAIN Antasari. Melalui proses perjuangan panjang dan berbagai pendekatan dengan Pemerintah Pusat, maka pada

tanggal 20 November 1964 berdasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 diresmikanlah Pembukaan IAIN Al Jam'iah Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Rektor pertama H. Jafry Zamzam dengan sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinan fakultasnya masing-masing, yaitu: H. Abdurrahman Ismail sebagai Dekan Fakultas Syariah Banjarmasin, H. Usman sebagai Dekan Fakultas Syariah Kandangan, H.M. As'ad Fakultas Tarbiyah Barabai, dan H. Abdul Wahab Sya'rani sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Amuntai.

Adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 ini berarti bahwa Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari mempunyai dua cabang, yaitu Fakultas Syariah Banjarmasin dan Fakultas Syariah Kandangan. Fakultas Syariah yang berada di Banjarmasin sejak tahun 1961 sampai tahun 1965 menempati Kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama bersama tiga fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Proses perkuliahan menggunakan gedung bekas Kodam X Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada Tahun 1965, kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi Sekolah Persiapan IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Sebagai lembaga pendidikan yang masih muda, kelengkapan sumber daya manusia masih dirasakan sebagai masalah.

Fakultas Syariah Kandangan berdiri bertepatan dengan diresmikannya IAIN Al Jam'iah Antasari. Karena statusnya sebagai perguruan tinggi Islam Negeri, sebagian besar mahasiswa Fakultas Adab (semula bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab) Kandangan pindah ke Fakultas Syariah Kandangan. Sejak berdiri sampai integrasi pada tahun 1978, Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari Kandangan hanya menyelenggarakan program Sarjana Muda. Mahasiswa yang ingin melanjutkan program sarjana lengkap kebanyakan melanjutkan ke Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari Banjarmasin.

Pada tahun 1978 dilakukan integrasi konsentrasi kegiatan akademik Fakultas Syariah Kandangan ke Fakultas Syariah Banjarmasin. Dosen dan karyawan sebagian ikut pindah ke Banjarmasin dan sebagian pegawai pemda kembali ke instansinya. Barang-barang inventaris/aset, termasuk buku-buku perpustakaan sumbangan masyarakat, mahasiswa, dan para jemaah haji, sebanyak 2 truk turut diangkut ke Banjarmasin. Pegawai yang ditugaskan untuk membawa barang inventaris/aset tersebut adalah Bapak Murniansyah. Akan tetapi, sangat disayangkan data-data penting tertulis mengenai jumlah dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Syariah Kandangan tidak ditemukan lagi kecuali mengandalkan ingatan para pegawainya.

Setelah Kantor Pusat dan seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin, begitu juga fakultas-fakultas yang berada di daerah, termasuk Syariah Kandangan, diintegrasikan ke

Banjarmasin, maka gedung-gedung dikembalikan kepada Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat.

b. Perkembangan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, setiap fakultas di lingkungan IAIN yang sekarang alih status menjadi UIN dapat membuka prodi. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan, fakultas-fakultas di lingkungan UIN Antasari hanya membuka beberapa prodi sesuai dengan keperluan, dan prodi itu pada umumnya ada pada Program Sarjana, kecuali pada Fakultas Tarbiyah sudah ada sejak program Sarjana Muda.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam beberapa nama prodi mengalami perubahan, yaitu: Jurusan/Prodi Perbandingan Hukum dan Mazhab berubah menjadi Perbandingan Mazhab, Siyash Jinayah menjadi Hukum Tata Negara (Siyash), Muamalat menjadi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ekonomi Islam menjadi Ekonomi Syariah, dan Ahwal al-Sakhsyiyah menjadi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam umumnya berasal dari latar belakang pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sebagian besar mahasiswa berasal dari Kalimantan Selatan dan lainnya berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan luar Kalimantan. Secara ekonomi, berasal dari golongan ekonomi beragam: menengah ke atas,

menengah, dan menengah ke bawah. Pekerjaan orang tua mereka adalah wiraswasta, pegawai negeri sipil, petani, dan lain-lain.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam didukung 81 orang dosen berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hampir seluruhnya bersertifikat pendidik profesional, terdiri dari 4 orang dosen bergelar profesor doktor, 10 orang dosen bergelar doktor, 6 orang dosen sedang merampungkan program doktor, 59 orang dosen bergelar magister, 2 orang masih melanjutkan pendidikan S.2, dan 14 orang dosen tidak tetap. Selain itu juga didukung tenaga administrasi sebanyak 8 orang yang berstatus PNS dan 8 orang lagi sebagai tenaga honorer.

Untuk menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam saat ini sudah memiliki sarana yang cukup memadai untuk pembelajaran dan terus mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dimiliki.

#### c. Visi dan Misi

Untuk menyatukan langkah dalam membangun pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan maka visi, misi, tujuan, dan sasaran unit pengelola Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari dirumuskan secara partisipatif antar-Tim Penyusun Visi dan Misi pada tingkat fakultas dengan melibatkan semua pihak, seperti pimpinan fakultas, para alumni yang mengabdikan pada berbagai instansi baik

pemerintah maupun swasta, para ahli, pakar serta *stake holders* yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan ekonomi Islam.

Visi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah berhasil dirumuskan adalah “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Kesyarifan yang Unggul dan Berkarakter”.

Misi dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin di antaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program fakultas untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi fakultas.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- 3) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- 4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
- 6) Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- 7) Melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
- 8) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan fakultas.
- 9) Menyelenggarakan administrasi fakultas.

10) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Untuk mendukung visi dan misi Program Studi, maka dilakukan upaya-upaya peningkatan. Peningkatan dilakukan melalui penyelenggaraan-penyelenggaraan pembelajaran yang kondusif, aktual dan kontemporer, penyediaan sumber belajar dan penggunaan teknologi mutakhir dalam media pengajarannya, penyelenggaraan pelayanan berkualitas dan pelayanan prima. Untuk mencapai sasaran menjadi profesi yang dikehendaki dari profil lulusan melalui peningkatan kompetensi yang mencakup kompetensi akademik, kepribadian dan keterampilan.

Kurikulum yang dibuat pun telah mengejawantahkan visi dan misi tersebut. Bahkan kurikulum senantiasa terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan lingkungan dan dinamika yang ada pada *users/stake holders*. Sejak dibuka pada tahun 1968 hingga sekarang tahun 2014, sudah sering dilakukan penggantian kurikulum. Saat ini ada dua kurikulum yang diterapkan, yakni Kurikulum 2010 dan Kurikulum 2013 yang berlaku efektif bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2013/2014, sedangkan mahasiswa lama, yaitu tahun masuk 2012, 2011, 2010 tetap menggunakan kurikulum tahun 2010. Hasil yang diharapkan dari kurikulum tersebut adalah terwujudnya tujuan dan sasaran fakultas.

## B. Laporan Penelitian

### 1. Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015 di Kota Banjarmasin



Pelaksanaan pilkada di Kota Banjarmasin pada 9 desember 2015 terbagi kedalam beberapa langkah berikut:

- a. Pemungutan suara yang dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon yang dilakukan pada hari libur (diliburkan sebagaimana diatur dalam Kepres No 25 Tahun 2015 tentang hari pilkada sebagai hari libur).
- b. Penggunaan hak pilih, pemilih harus tercantum terlebih dahulu dalam DPT dan di TPS yang telah ditentukan. Jika karena terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih ditempat yang ditetapkan, dapat mengajukan Formulir C-6 KWK KPU atau Surat Pindah Memilih dari PPS Asal. Hal keadaan terpaksa ini meliputi sebab tugas pelayanan masyarakat, sakit, menjadi tahanan, serta hal tak terduga lainnya.
- c. Penghitungan suara

Setelah selesai waktu untuk memberikan suara pada pukul 13.00 penghitungan surat suara segera dilakukan. Selain itu juga dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 21 Kelurahan Kuripan pada tanggal 13 Desember 2015 karena ditemukan adanya pemilih tidak sesuai domisili yang menggunakan KTP sebagian besar bukan warga kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil temuan Panwaslu Kota Banjarmasin, dari 80 jumlah pemilih, terdapat 51 orang asalnya dari berbagai daerah seperti Palangkaraya, Semarang, Pamulang, bahkan Aceh. Proses pemilihan ulang berlangsung tertib, dan hingga selesainya penghitungan suara, tidak terjadi penghitungan suara ulang.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Banjarmasin menunjukkan hasil sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pemilik hak pilih dalam DPT	445.381 pemilih
Pemilih disabilitas	64 pemilih
Pengguna hak pilih	289.965 suara
Suara tidak sah	19.186 suara
Suara sah	270.779 suara

## 2. Hasil Wawancara

Untuk mendapatkan berbagai data ataupun informasi yang diperlukan, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Adapun pedoman wawancara yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

- A. Biodata Responden terdiri dari:
  1. Nama.
  2. Jurusan.
  3. Alamat.
- B. Apa yang anda ketahui tentang politik ?
- C. Apakah anda pernah terlibat dalam dunia politik ?
- D. Apa yang melatar belakangi anda sehingga tertarik untuk ikut berpolitik ?
- E. Apakah yang anda ketahui tentang pilkada ?

- F. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember 2015?
- G. Menurut anda bagaimana pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015, dibanding dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya ?
- H. Menurut anda lebih efektif pelaksanaan pilkada serentak atau tidak ?

Setelah penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara di atas terhadap 13 informan yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai jurusan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, didapatlah beberapa hasil temuan penelitian berupa laporan hasil wawancara yakni sebagai berikut:

a. MH<sup>58</sup>

Jurusan: D3 Perbankan Syariah (semester VII)

Alamat: Jl. Mahligai Komp. Boga Indah I No. 11

Responden pertama ini mengatakan definisi politik adalah suatu seni menggerakkan orang lain. Ketika ditanyakan mengenai keterlibatannya dalam dunia politik, responden mengaku pernah terlibat atau berpartisipasi dalam politik. Keterlibatannya dalam politik yaitu dengan ikut mencoblos (berpartisipasi dalam pemilihan umum), menjadi saksi dalam pemilihan umum, dan pernah bekerja sebagai surveyor dalam sebuah survei politik (survey mengenai elektabilitas calon pemimpin).

---

<sup>58</sup>Diwawancarai pada tanggal 22 November 2016 Di gedung KNPI Kalimantan Selatan

Ketika responden ditanya mengenai hal yang melatarbelakanginya sehingga tertarik untuk ikut berpolitik, responden mengatakan bahwa dia tertarik karena ingin belajar,serta mengikuti perkembangan zaman.

Mengenai hal seputar pilkada, responden mengatakan bahwa pilkada adalah suatu bentuk dimana seseorang memilih pemimpin baik di daerah, di propinsi ataupun Negara. Mengenai partisipasinya dalam pilkada tahun 2015, responden mengaku turut berpartisipasi dalam pilkada tersebut. Dia juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan pilkada serentak, menurut responden pilkada serentak lebih meriah dibanding pada pilkada-pilkada sebelumnya, lebih meriah karena serentak sehingga peserta pemilukada banyak dan pemilihannya tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Lebih lanjut, informan berpendapat bahwa lebih efektif pilkada serentak karena tidak memakan waktu yang banyak.

b. AS<sup>59</sup>

Jurusan: Hukum Keluarga (semester IX)

Alamat: Jl.Kemiri No. 4

Ketika responden kedua ini ditanyakan mengenai definisi politik, dia mengaku kurang mengetahui, tetapi ketika ditanyakan lebih lanjut, apa yang dia ketahui ketika mendengar tentang politik, responden mengatakan bahwa yang diketahuinya mengenai politik ialah yang buruk jadi baik,dan yang baik jadi buruk.

---

<sup>59</sup>Diwawancarai pada 23 November 2016 di Komp. Sejahtera Kec. Gambut

Mengenai keterlibatannya dalam politik, informan ini mengatakan pernah terlibat dalam survey politik, dengan alasan untuk mencari pengalaman serta dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut responden pilkada adalah pemilihan kepala daerah, hanya itu yang dia ketahui mengenai pilkada.

Responden ini mengaku bahwa pada 2015 kemarin dia mengikuti pilkada. Lebih lanjut lagi ketika ditanya pendapatnya mengenai pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015 kemarin, responden ini mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada 2015 kemarin lebih baik dan sangat bagus dari pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya karena serentak. Tapi ketika ditanya lebih jauh mengenai persepsinya tentang efektifitas pilkada serentak, responden berpendapat bahwa sebenarnya sama saja baik pilkada serentak maupun pilkada tidak serentak.

c. AR<sup>60</sup>

Jurusan: Ekonomi Syariah (semester VII)

Alamat: Jl. Pangeran Antasari Gg. Setia

Ketika ditanya definisi politik, responden ketiga ini berpendapat bahwa menurutnya politik adalah kekuasaan, kepentingan maupun kepentingan golongan yang intinya adalah jalan menuju suatu kekuasaan. Ketika ditanya pengalamannya berpolitik, responden ini mengaku pernah menjadi saksi ketika pilpres, pernah juga menjadi petugas KPU di Pekapuran Raya dengan alasan ekonomi.

---

<sup>60</sup>Diwawancarai pada 26 November 2016 di Masjid IAIN Antasari

Menganai pelaksanaan pilkada pada tahun 2015 kemarin, responden mengaku mengikuti pilkada serentak. Mengenai perbedaan pelaksanaan pilkada tahun 2015 dibanding pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya Responden berpendapat bahwa pilkada serentak kemarin itu lebih meriah dan lebih banyak yang berminat dan lebih banyak suara yang masuk. Responden juga setuju dengan pilkada serentak karena menurutnya suara lebih banyak yang masuk artinya partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk ikut memilih serta dari segi waktu lebih efektif.

d. AMR<sup>61</sup>

Jurusan: Hukum tata Negara (semester III)

Alamat: Jl. Trans Kalimantan, Handil Bakti Komplek Handil Bakti Indah

Ketika ditanyakan pendapatnya mengenai definisi politik, responden mengatakan bahwa politik adalah suatu cara seseorang mempengaruhi orang lain. Mengenai keterlibatannya dalam politik, responden mengaku pernah mengikuti kegiatan kampanye politik, ketika ditanya lebih lanjut mengenai ketertarikannya terhadap politik, responden ini mengaku tertarik ikut berpolitik dengan alasan ingin merubah system dalam pemerintahan.

Mengenai pengetahuannya tentang pilkada, responden mendefinisikan pilkada sebagai suatu pemilihan untuk memilih calon kepala daerah. Dia juga mengatakan bahwa tahun 2015 kemarin turut berpartisipasi dalam pilkada. Tetapi lebih lanjut responden ini mengatakan

---

<sup>61</sup>Diwawancarai pada 28 November 2016 di Jl. Kemiri Banjarmasin Timur

bahwa pada pilkada serentak tahun 2015 kemarin banyak terdapat penyelewengan seperti money politik dan sejenisnya.

Responden berpendapat bahwa dalam semua system pasti ada positif dan negatifnya. Tetapi, mengenai pilkada serentak responden berpendapat bahwa pilkada serentak itu lebih efektif karena system demokrasi kalau serentak adalah dari rakyat sendiri yang beramai-ramai, selain itu menurutnya pilkada serentak juga lebih efektif karena dapat menghemat dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan pilkada.

e. AL<sup>62</sup>

Jurusan: Hukum Keluarga (semester VII)

Alamat: Jl. Hikmah Banua Km. 6 Banjarmasin Timur

Ketika ditanyakan mengenai definsi politik, responden ini mengatakan bahwa menurutnya politik adalah sebuah kekuasaan di mana kekuasaan itu memang diciptakan untuk tujuan kemaslahatan berupa taktik dan setrategi. Mengenai keterlibatannya dalam dunia politik responden ini mengaku bahwa ia pernah mengikuti kegiatan kampanye politik dan sebagai pemilih pada pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015, responden mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang ilmu politik dengan belajar dari kampus dan organisasinya. Responden juga mengaku mengikuti pilkada pada tahun 2015 kemarin.

Lebih lanjut ketika ditanyakan mengenai pendapatnya mengenai pelaksanaan pilkada tahun 2015 kemarin. Responden memiliki penilaian

---

<sup>62</sup>Diwawancarai pada 28 November di Balai Kota Banjarmasin

tersendiri terhadap pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015 dengan mengatakan bahwa teknis pelaksanaan pilkada pada tahapan awal pelaksanaannya ada cukup banyak embel-embel yang kurang bagus dari tim-tim sukses yang membagi-bagikan uang dari rumah-kerumah (ada money politik) untuk tujuan dipilihnya pasangan calon yang dimaksud yang menurutnya adalah hal yang sangat tidak bagus.

Mengenai pilkada serentak, responden berpendapat bahwa pilkada serentak menurutnya lebih efektif daripada pilkada tidak serentak karena bisa menghemat dana dari pemerintah yang melaksanakan pilkada.

f. MFH<sup>63</sup>

Jurusan: Ekonomi Syariah (semester VII)

Alamat: Jl. Bulan Mas

Ketika ditanyakan mengenai pengetahuannya tentang politik, responden mengatakan bahwa politik menurutnya adalah sebuah kesatuan pemikiran yang membentuk atau menciptakan suatu tujuan yang inti tujuannya adalah untuk pembangunan wilayah atau daerah atau negara.

Mengenai keterlibatannya dalam politik, responden mengatakan bahwa ia pernah terlibat dalam politik dari mengikuti kampanye hingga menjadi tim sukses karena dengan begitu dia dapat mempelajari politik. Mengenai pilkada responden mengatakan bahwa Menurutnya pilkada adalah pemilihan kepala daerah berupa memilih gubernur ataupun wlikota. Lebih lanjut lagi informan mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 dia

---

<sup>63</sup>Diwawancarai pada 28 November 2016 di Balai Kota Banjarmasin



tidak mengikuti dalam pilkada, tetapi ketika ditanyakan lebih lanjut, responden mengaku bahwa sudah mengetahui tentang pilkada serentak tetapi tidak mengungkapkan definisi pilkada lebih lanjut.

Menurut responden ini pelaksanaan pilkada serentak kemarin terdapat sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya tetapi belum bagus dan juga belum optimal. Tentang persepsinya terhadap pilkada serentak responden setuju dengan pelaksanaan pilkada serentak karena menurutnya pilkada yang dilaksanakan serentak dapat mengurangi biaya dan bagi lingkungan juga berdampak bagus karena semaraknya pilkada.

g. EW<sup>64</sup>

Jurusan: Perbankan Syariah (semester VII)

Alamat: JL. Gatot Subroto

Mengenai pengetahuannya tentang politik, menurutnya politik itu seperti adanya partai-partai. Mengenai keterlibatannya dalam politik, informan ini mengaku pernah terlibat langsung namun hanya sebagai pemilih yang memberikan hak suaranya pada saat pemilihan umum. Responden menjelaskan pengertian pilkada yang ia ketahui, menurutnya pilkada adalah pemilihan kepala daerah seperti memilih gubernur, walikota bupati dan sebagainya.

Responden mengaku pada tahun 2015 kemarin mengikuti pilkada serentak. Responden juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan

---

<sup>64</sup>Diwawancarai pada 28 November 2016 di Balai Kota Banjarmasin

pilkada serentak di tahun 2015 menurutnya pelaksanaan pilkada tahun 2015 sama saja jika dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Tetapi, lebih lanjut lagi menurutnya pilkada serentak lebih efektif dan lebih bagus, karena dengan pilkada serentak biaya untuk pilkada bisa ditekan menjadi lebih sedikit serta dari segi waktu juga lebih efektif.

h. MF<sup>65</sup>

Jurusan: Hukum Keluarga (semester IX)

Alamat: Jl. Sutoyo Ujung Banjarmasin

Mengenai pendapatnya tentang politik, menurutnya politik adalah kumpulan manusia yang memikirkan manusia-manusia lainnya untuk mendapatkan uang dan untuk kemaslahatan orang-orang. Lebih lanjut ketika ditanyakan mengenai keterlibatannya dalam politik, responden ini mengaku belum pernah terlibat dalam politik dan lebih lagi dia menambahkan bahwa insyaallah dia tidak akan pernah melibatkan diri dalam politik. Dia menambahkan bahwa terkait keengganannya terlibat politik, dia beralasan bahwa politik itu sangat licik dan sangat tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia. Lebih jauh lagi dia menambahkan bahwa berpolitik itu hanya menguntungkan pihak yang berpolitik, sedangkan orang yang tidak berpolitik mengharapkan politisi akan baik terhadapnya, tetapi politikus hanya mengambil keuntungan darinya dengan memanfaatkan kepercayaannya.

---

<sup>65</sup>Diwawancarai pada 28 November 2016 di Aspol Bina Brata Gg. II Banjarmasin Timur

Mengenai persepsinya terkait pilkada, menurutnya pilkada adalah pemilihan gubernur, ataupun kepala daerah lainnya. Responden mengaku tidak mengikuti pilkada pada tahun 2015 kemarin. Tetapi dia memiliki pendapat tentang pelaksanaan pilkada serentak kemarin, menurutnya pilkada serentak kemarin kurang efektif dan merupakan pemborosan bagi Negara, karena dilaksanakan serentak, maka pengawasannya kurang dan dana yang dikeluarkan sangat banyak, serta pemeriksaan hasil akhirnya juga tidak efektif. Pilkada tahun 2015 kemarin menurutnya banyak money politik yang terjadi.

i. SNJ<sup>66</sup>

Jurusan: Hukum Keluarga (semester IX)

Alamat: Jl. Pekapuran Raya Rt 31 No 12

Responden ini mengaku tidak mengetahui apa itu definisi politik. Tetapi, ketika ditanyakan lebih lanjut, ia mengaku pernah terlibat politik ketika menjadi saksi pilkada 2015. Alasan spesifik mengenai ketertarikannya ikut berpolitik menurutnya tidak ada, hanya ikut-ikutan teman.

Mengenai pilkada, responden memberikan definisi pilkada yang ia ketahui, menurut responden pilkada adalah pemilihan kepala daerah, tidak lebih. Responden juga sudah pernah terlibat atau berpartisipasi dalam pilkada. Pada tahun 2015 responden juga mengikuti pilkada. Menurutnya pelaksanaan pilkada kemarin sama saja dengan pilkada-pilkada

---

<sup>66</sup>Diwawancarai pada 29 November 2016 di Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin

sebelumnya. Ia menambahkan baik pilkada serentak atau tidak sama saja. Tetapi, informan berpendapat bahwa lebih efektif tidak serentak karena bisa lebih fokus dan pengawasannya bisa lebih ketat.

j. MA<sup>67</sup>

Jurusan: Hukum Tata Negara (semester V)

Alamat: Jl. Semanda Gg. 9 samping SMK 3 Banjarmasin

Definisi politik menurut responden ini ialah cara bagaimana kita mempengaruhi kelompok atau kelompok lain untuk mempertahankan kelompok tersebut. Ketika responden ditanya mengenai pengalamannya terlibat politik responden mengaku pernah menjadi saksi di Jambu Burung Kabupaten Banjar sewaktu pilkada. Responden mengaku tertarik ikut terlibat dalam politik ialah untuk melihat bagaimana sistem politik dalam masyarakat.

Menurut responden, pilkada adalah pemilihan gubernur dan walikota. Pada tahun 2015 kemarin, responden juga mengikuti pilkada. Menurutnya, pilkada tahun 2015 lebih meriah daripada sebelumnya karena semua dari daerah-daerah ikut memilih dan acara pemilukada nya lebih bagus daripada sebelumnya, tetapi ia menambahkan pendapatnya bahwa mengenai cara pemilihannya masih terdapat banyak money politik. Menurutn responden lebih baik dan lebih efektif pilkada serentak karena dari desa semua masyarakat bisa memilih diseluruh daerah.

---

<sup>67</sup>Diwawancarai pada 29 November 2016 di Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin

k. R<sup>68</sup>

Jurusan: Hukum Tata Negara (semester V)

Alamat: Jl. Pramuka Komp. Angsana Rt 2 Km. 6 Banjarmasin

Menurut responden ini, pengertian politik adalah siasat bagaimana cara mempertahankan pemerintahan. Responden mengaku belum pernah terlibat politik dengan alasan karena belum tertarik. Tetapi, meskipun ia mengaku belum pernah terlibat politik, setelah ditanyakan lebih lanjut, responden mengakui bahwa ia pernah mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah di Banjarmasin.

Mengenai pilkada, responden mengungkapkan definisi pilkada yang menurutnya adalah pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2015 responden ini juga telah mengikuti pilkada. Ketika ditanyakan mengenai penilaian terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, responden mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan penilaian terhadap pilkada karena baru tahun kemarin mengikuti pilkada sehingga tidak bisa membandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Tetapi, responden juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang menurutnya lebih efektif karena waktunya lebih hemat.

---

<sup>68</sup>Diwawancarai pada 29 November 2016 di Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin

1. L<sup>69</sup>

Jurusan: Perbankan Syariah (semester VII)

Alamat: Jl. Gatot Subroto IV Gg. Kemiri Dalam No. 88A Banjarmasin

Menurut responden ini politik adalah suatu kegiatan dalam kekuasaan terhadap Negara maupun hal lainnya. Mengenai pengalamannya terlibat politik, responden mengaku pernah menjadi saksi calon pada pemilu yang dilaksanakan di daerah asalnya.

Ketika ditanyakan definisi pilkada, ia mengatakan bahwa menurutnya pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Mengenai pengalamannya terkait pilkada, responden mengaku tidak pernah ikut pilkada dan hanya pernah mengikuti pilpres (pemilihan Presiden), mengenai pendapat responden tentang perbandingan pilkada serentak dan tidak serentak, responden ini mengaku kurang tau tentang pilkada kemarin seperti apa karena tidak terlibat secara langsung.

Mengenai pendapatnya tentang pilkada serentak, responden ini berpendapat pilkada serentak kurang efektif karena yang dia tau pilkada serentak itu membuat bingung karena terlalu banyak pasangan yang dipilih sedangkan pengetahuan masyarakat tentang calon masih kurang jadi memilihnya bukan karena kualitas melainkan karena hati nurani. Pilkada serentak kurang efektif karena tidak hanya calon untuk kabupaten tetapi untuk propinsi juga sehingga lebih banyak dan membingungkan masyarakat karena banyaknya calon. Ia menambahkan bahwa menurutnya

---

<sup>69</sup>Diwawancarai pada 7 Desember 2016 di IAIN Antasari Banjarmasin

untuk masyarakat berpendidikan tinggi pilkada serentak mungkin lebih efektif, tapi bagi masyarakat berpendidikan rendah (masyarakat awam) mungkin kurang efektif.

m. KNA<sup>70</sup>

Jurusan: Ekonomi Syariah (semester V)

Alamat: Jl. A. Yani Km. 4,5 Bumi Mas Prona 1 Gg Maya Sari 1  
Banjarmasin

Menurut responden ini politik adalah cara yang di hasilkan dari pemikiran kemudian dikembangkan dengan usaha agar dapat mewujudkan atau mencapai suatu tujuan untuk kebaikan bersama. Tentang pengalamannya berpolitik, responden ini mengaku pernah mengikuti kampanye. Terkait minatnya terlibat politik ia beralasan karena dengan ikut berpolitik adalah salah satu cara kita agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dalam rangka untuk kebaikan bersama.

Definisi pilkada menurut responden ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk pemilihan gubernur. Responden pada tahun 2015 tidak mengikuti pilkada, selain itu responden mengatakan tidak mengetahui apakah lebih baik pilkada tahun 2015 atau pilkada-pilkada sebelumnya. Mengenai pilkada serentak, responden memberi pendapat setuju. Menurutnya pilkada serentak lebih efektif karena lebih menghemat biaya, waktu dan tempat.

---

<sup>70</sup>Diwawancarai pada 7 Desember 2016 di IAIN Antasari Banjarmasin

## 3. Matriks 1 keterlibatan politik

No	Nama	Keterlibatan Politik	Bentuk Keterlibatan	Alasan
1	MH	Pernah	Ikut survei, mencoblos, & menjadi saksi	Mempelajari politik
2	AS	Pernah	survey elektabilitas	Mencari pengalaman & memenuhi kebutuhan ekonomi.
3	AR	Pernah	Menjadi saksi & petugas KPU	Ekonomi
4	AMR	Pernah	Ikut kampanye	Ingin merubah system dalam pemerintahan.
5	AL	Pernah	Ikut kampanye & sebagai pemilih	Ingin belajar berpolitiik
6	MFH	Pernah	Ikut kampanye & timses	Mempelajari politik
7	EW	Pernah	Pemilih/Pencoblos	Ingin belajar politik
8	MF	Tidak pernah	Tidak pernah terlibat & tidak ingin terlibat	Politik itu sangat licik dan tidak manusiawi
9	SNJ	Pernah	Menjadi saksi	Ikut-ikutan teman
10	MA	Pernah	Menjadi saksi	Mempelajari politik
11	R	Pernah	Ikut kampanye	
12	L	Pernah	Menjadi Saksi	Ingin mengetahui dan belajar politik
13	KNA	Pernah	Ikut kampanye	Mempelajari politik

## 4. Matriks 2 tentang presepsi pilkada serentak

No	Nama	pilkada 2015	Penilaian terhadap pilkada 2015	Presepsi pilkada serentak	Alasan
1	MH	Ikut	Lebih meriah, banyak partisipasi warga	Lebih efektif	hemat waktu
2	AS	Ikut	Lebih baik dan sangat bagus,	Sama saja	
3	AR	Ikut	Lebih banyak suara yang masuk	Lebih efektif	segi waktu lebih efektif
4	AMR	Ikut	Banyak	Lebih	karena dapat



			penyelewengan	efektif	menghemat dana
5	AL	Ikut	Ada money politik	Lebih efektif	Hemat dana
6	MFH	Tidak ikut	Terdapat sedikit peningkatan	Lebih efektif	Ramai & hemat dana
7	EW	Ikut	Sama saja	Lebih efektif	Hemat dana & waktu
8	MF	Tidak ikut	Kurang efektif	Kurang efektif	Boros, dan pengawasan tidak efektif
9	SNJ	Ikut	sama saja	Tidak efektif	Pengawasan tidak fokus
10	MA	Ikut	lebih ramai	Lebih efektif	Partisipasi warga lebih ramai
11	R	Ikut	Tidak tahu	Lebih efektif	Hemat waktu
12	L	Tidak ikut	Kurang efektif	Kurang efektif	Membingungkan banyaknya calon
13	KNA	Tidak ikut	Tidak tahu	Lebih efektif	Hemat dana dan waktu

## 2. Analisis Data

Pelaksanaan pilkada serentak tersebut jika dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat sedikit, hanya sekitar 55% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu jumlah suara tidak sah mencapai 19.186 suara. Rendahnya partisipasi pemilih di Kota Banjarmasin merupakan pekerjaan rumah bagi KPU Kota Banjarmasin untuk berinovasi meningkatkan partisipasi warga untuk memilih, hal ini mengingat pentingnya partisipasi yang besar dari pemilih untuk sebuah legitimasi pemetintah yang terpilih.

Besarnya jumlah suara tidak sah juga menandakan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pencoblosan, sehingga diperlukan sosialisasi yang

lebih intens terhadap warga pemilih di Kota Banjarmasin tentang perlunya menggunakan hak pilih, serta tentang tata cara pencoblosan yang benar.

Menyikapi hal tersebut, maka negara berkewajiban memberikan sosialisasi mengenai tata cara pemilihan terhadap masyarakat. Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pemerintah mengakomodir pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis. Pelaksanaan pilkada yang demokratis adalah dengan menjamin dan melindungi rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya didalam pemilihan umum. Pentingnya pemilu atau pilkada bagi rakyat dalam menjamin terlaksananya demokrasi tentu menjadikan negara berkewajiban berusaha melaksanakan pilkada secara maksimal. Maksimalnya pelaksanaan pemilihan tidak hanya dapat diukur dari lancarnya proses persiapan hingga pemilihan, namun juga dari besarnya penggunaan hak pilih atau kecilnya golput, serta kecilnya jumlah suara tidak sah. Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan pilkada yang baik. Salah satunya ialah melalui usaha-usaha persiapan dengan menjalin kerjasama dinas Kependudukan serta dengan berbagai pihak, baik petugas keamanan maupun masyarakat.

Pemungutan suara yang dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon, memang merupakan hal yang lazim dilakukan disetiap daerah pemilihan di Indonesia, peserta pemilihan dengan itu diharapkan dapat mengenali calon yang dipilihnya dengan mengenali nomor urut, nama atau gambar pasangan calon yang tersedia. Surat suara tersebut sudah sangat jelas bagi setiap pemilih. Namun yang juga perlu diperhatikan

adalah hak pilih dari penyandang disabilitas serta penyandang tuna netra dan warga yang memiliki kendala lainnya. Sehingga dengan begitu hak politik warga negara yang merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dilindungi konstitusi benar-benar dapat diberikan dengan baik. Berbagai cara tersebut di atas merupakan bentuk usaha memaksimalkan pelaksanaan pemilihan dengan memudahkan masyarakat.

Kebijakan hari libur pada hari pelaksanaan pilkada serentak juga merupakan terobosan baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Upaya pemerintah ini dari segi sosial ekonomi mungkin telah melalui berbagai pertimbangan. Namun, hal tersebut juga patut diapresiasi sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada, hal ini mengingat rendahnya partisipasi masyarakat pemilih pada pemilu sebelumnya yang salah satunya diakibatkan oleh keengganan masyarakat untuk meninggalkan pekerjaannya.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada sangatlah penting, terutama bagi seorang muslim. Mengenai keikutsertaan dalam pemilu, Syaikh Nashiruddin al-Albani berfatwa, jika dalam parlemen ada pihak-pihak yang memusuhi islam serta ada pilihan lain yang berbeda (lebih baik), maka beliau menasehatkan agar setiap muslim berpartisipasi untuk ikut pemilu dan memilih yang terbaik bagi manhaj yang sah.<sup>71</sup>

Partisipasi politik masyarakat pemilih dalam pilkada di Banjarmasin ini seharusnya sejalan dengan perundangan yang mendukung adanya partisipasi

---

<sup>71</sup>Farid, Mu'manHasan, *Seuntai Bunga Rampai Politik Islam*, (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm. 83

masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang dalam Pasal 131 ayat (1) Menjelaskan untuk mendukung kelancaran Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Ayat (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.<sup>72</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka aktifitas partisipasi politik warga sebagaimana disebutkan sebagian besar responden di atas perlu ditingkatkan

Tanpa adanya partisipasi warga dalam pemilu, maka tidak mungkin ada demokrasi, dan tidak akan ada pemerintahan demokratis. Karena itu, mencermati *voter turnout* menjadi sangat penting, bukan saja secara akademik, tetapi juga secara praktis.<sup>73</sup> Berdasarkan alasan tersebut, jika pelaksanaan pilkada serentak menjadikan partisipasi masyarakat untuk memilih lebih besar, maka kebijakan pelaksanaan pilkada serentak merupakan kebijakan yang tepat.

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum baik untuk memilih kepala daerah maupun memilih dewan perwakilan juga sangat penting. Abu Hasan Ali bin Muhammad mengatakan bahwa hukum pendirian pemimpin adalah fardhu kifayah.<sup>74</sup> Selain untuk memilih presiden atau gubernur, pemilihan Dewan

---

<sup>72</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>73</sup>Saiful Mujani, dkk, *Kuasa Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2012), cet pertama, hlm. 76

<sup>74</sup>Ali bin Muhammad bin Hubaid al Basry, *AL-Ahkam As-Sulthoniyah*, (Lebanon: Darul Fikri, 1960), hlm.5

Perwakilan Rakyat yang nantinya menjadi perwakilan masyarakat dalam bermusyawarah untuk menentukan arah kebijakan negara dan presiden yang menjalankan pemerintahan juga perlu mendapat partisipasi masyarakat terutama yang beragama Islam. Dalam Islam, sistem syura atau musyawarah yang dilakukan oleh dewan perwakilan telah lebih dulu dikenal, hal ini sebagaimana terdapat dalam ungkapan berikut.

أما الشوري , سواء الموردي والغزالي لم يعتقد أنها أساس الحياة السياسية والحياة الجماعية للمسلمين و هذا هو واحد مناتركة امؤسفت من الفقهاء في العصور الوسطى.<sup>75</sup>

Artinya: “*Sistem syura atau musyawarah baik menurut al-Mawardi dan al-Ghazali tidak termasuk dalam dasar kehidupan politik dan kehidupan jamaah kaum muslimin. Sistem syura merupakan satu peninggalan para pemikir atau para fuqaha pada masa pertengahan.*”

Terjadinya pemungutan suara ulang berdasarkan tindak lanjut laporan panwaslu kota menandakan bahwa panitia pengawas juga menjalankan pengawasannya dan melakukan fungsinya dengan benar. Adanya temuan Panwaslu terhadap banyaknya pemilih yang berasal dari luar kalsel setelah meneliti NIK pada KTP pemilih memiliki dua kemungkinan: *pertama*, para pemilih tersebut adalah warga pendatang yang menetap di domisili tersebut, namun yang bersangkutan belum memiliki KTP pada wilayah tersebut. *Kedua*, pemilih tersebut merupakan warga luar daerah yang sengaja datang untuk ikut memilih di kota.

---

<sup>75</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al Islam Wa Al-Qadhaya ad-Daulah*, hlm. 31

Berdasarkan kedua asumsi tersebut, tampaknya kemungkinan pertama merupakan alasan logis. Melihat hal tersebut, yang perlu menjadi evaluasi pelaksanaan pilkada di Banjarmasin adalah terkait penetapan DPT dan kordinasi dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Sehingga dapat dipastikan setiap warga negara di suatu wilayah mendapatkan hak politiknya. Jika pemilih yang berasal dari luar kalsel tersebut telah berdomisili di Banjarmasin dan menjadi warga banjarmasin, tentu mereka harus mendapatkan hak politiknya untuk memilih.

Adanya temuan banyaknya pemilih yang berasal dari daerah luar di TPS 21 kota Banjarmasin juga mengindikasikan kemungkinan adanya kejadian serupa di berbagai TPS lain, sehingga fungsi pengawasan oleh panwaslu serta fungsi pelaksanaan oleh panitia KPU harus ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga diharapkan dapat tercipta pilkada yang baik.

Matrix pertama tentang keterlibatan politik responden memperlihatkan temuan bahwa sebagian besar responden pernah terlibat perpolitikan, dan sebagian responden lainnya tidak pernah. Adapun bentuk keterlibatan dalam politik ialah dalam mengikuti kampanye pemilu atau pemilukada, saksi pemilu, petugas KPU dan survey elektabilitas politik. Sedangkan alasan keterlibatan responden dalam politik ialah untuk mempelajari politik, alasan ekonomi, serta hanya ikut-ikutan. Ada juga beberapa responden yang meskipun tidak pernah terlibat politik tetapi tertarik terhadap politik dengan alasan ingin merubah sistem. Selain itu ada juga responden yang mengatakan tidak ingin terlibat politik karena responden tersebut menilai politik itu adalah sesuatu yang negatif.

Dari berbagai temuan di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pernah terlibat dalam politik. Keterlibatan tersebut menurut penulis merupakan hal yang positif sebagai pembelajaran politik bagi mahasiswa. Pendidikan sosial politik bukan hanya didapatkan dari materi perkuliahan, tetapi juga bisa didapatkan dengan terjun langsung kedalam dinamika kegiatan politik seperti pemilihan umum, survei sosial politik, dan lain sebagainya. Kampus merupakan tempat mimbar bebas yang mengawali seorang mahasiswa mengenal kehidupan politik, kendati pun yang bersangkutan bukan dari jurusan ilmu politik atau ilmu-ilmu sosial lainnya.<sup>76</sup> Dengan memahami realitas kehidupan politik, mahasiswa dapat memahami realitas kehidupan sosial dan mempunyai bekal untuk terjun kedalam kehidupan sosial masyarakat di masa mendatang.

Sebagai seorang akademisi muslim, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam juga memiliki keterikatan kepada negaranya, serta memiliki hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak politik yang telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, agama Islam juga menunjukkan pentingnya keterlibatan seorang muslim dalam mempelajari politik, memahami dan peduli terhadap keadaan bangsa, karena manusia dalam pandangan Islam mampu untuk melakukan perubahan dan dituntut untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Dalam Q.S. *Ar-Ra'd* : 11.

---

<sup>76</sup>Inu Kencana Syafii & Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2006), cet ketiga, hlm. 86

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ  
 وَاٰلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah Tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*<sup>77</sup>

Salah satu dari berbagai alasan keterlibatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam perpolitikan yaitu untuk tujuan belajar, atau mempelajari politik. Hal ini menurut asumsi penulis adalah hal yang sesuai dengan status mereka sebagai pelajar. Maka selain mendapatkan berbagai pelajaran dalam perkuliahan, mereka masih membutuhkan banyak wawasan sosial politik yang dapat mereka peroleh dengan melibatkan diri dalam kegiatan perpolitikan seperti menjadi surveyor elektabilitas, menjadi saksi dalam pelaksanaan pemilu, serta menjadi tim sukses. Berbagai hal tersebut merupakan suatu bentuk dari partisipasi politik mahasiswa.

Partisipasi politik mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam termasuk dalam kategori partisipasi aktif, hal ini dikarenakan berbagai bentuk keterlibatan mahasiswa dalam perpolitikan berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output.<sup>78</sup> Partisipasi politik mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi

---

<sup>77</sup>Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Prespektif Islam*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 130

<sup>78</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 142-143



Islam berdampak bagus bagi kelangsungan perpolitikan ke depan. Kerena, tanpa partisipasi politik, kehidupan politik akan mengalami kemacetan.<sup>79</sup>

Selain beberapa hal di atas, alasan lainnya keterlibatan politik adalah untuk tujuan ekonomi. Hal ini menurut penulis adalah hal wajar, mengingat hajatan pemilihan kepala daerah merupakan kesempatan bagi setiap masyarakat terutama mahasiswa. Mahasiswa dapat mempelajari politik dengan terlibat dalam survei pemilu, saksi pemilu serta petugas KPU dan berbagai keikutsertaan tersebut biasanya mendapat imbalan jasa berupa uang.

Adanya persepsi negatif responden terhadap politik sebagaimana terdapat pada pernyataan salah satu responden di atas, menurut penulis patut dijadikan bahan renungan ataupun evaluasi bagi pelaku ataupun pemilik kekuasaan politik. Kekuasaan politik tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai pertarungan untuk memegang kendali negara, tetapi kekuasaan tu juga harus dilandasi dengan etika politik serta komitmen bagi kepentingan seluruh rakyat,<sup>80</sup> sehingga dengan begitu diharapkan seluruh rakyat dapat memiliki kepercayaan terhadap kekuasaan politik dan hal tersebut menurut penulis akan berdampak bagus bagi pemerintahan karena mendapat legitimasi kekuasaan politik yang kuat dan menyeluruh.

Banyaknya mahasiswa yang memiliki pengalaman keterlibatan dalam politik ataupun beragamnya wawasan mahasiswa tentang politik dan pilkada menjadikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan perpolitikan nasional seperti pemilihan umum

---

<sup>79</sup>Rafael Ragan Maran, *Pengantar Psikologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 152

<sup>80</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika TataNegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet 1 hlm. 208

maupun pemilihan kepala daerah. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk terjun ke masyarakat kelak. Mahasiswa Fakultas Syariah sebagai akademisi muslim tentu memiliki tanggungjawab untuk memelihara umat yang salah satunya dapat ditempuh melalui keterlibatan politik. Para ulama dunia pun memainkan peran penting dalam keterlibatan perpolitikan, seperti Ayatullah Khomeini, Mutahairi, hingga Yusuf Qardhawi.<sup>81</sup>

Dari temuan hasil penelitian pada matriks kedua tentang persepsi responden terhadap pilkada serentak di Banjarmasin terlihat beberapa temuan sebagai berikut, sebagian besar responden mengikuti pilkada serentak tahun 2015 dan sebagian kecil lainnya tidak mengikuti. Adapun penilaian responden terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2015 sebagian besar mengatakan pilkada tahun 2015 lebih ramai dan banyak partisipasi warga untuk memilih. Selain itu sebagian lainnya menilai pilkada tahun 2015 sama saja dengan pilkada sebelumnya. Ada pula yang menilai pilkada tahun 2015 terdapat money politik.

Mayoritas responden menilai pilkada serentak lebih efektif daripada pilkada tidak serentak, meskipun ada juga yang menilai sebaliknya dan menganggapnya sama saja baik pilkada serentak ataupun pilkada tidak serentak. Dengan pilkada serentak, peserta pemilih ataupun partisipasi pemilih lebih banyak atau lebih ramai. Hal ini menurut penulis merupakan hal yang sangat baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Persepsi demikian menggambarkan besarnya dukungan akademisi terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Meskipun,

---

<sup>81</sup>John L. Esposito, *The Oxford History Of Islam*. (New York: Oxford University Press. 1999), hlm. 680

data pelaksanaan pilkada serentak di Banjarmasin pada tahun 2015 menurut penulis menunjukkan hal yang berbeda, yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat, namun dari persepsi mahasiswa ini menunjukkan kemungkinan bahwa jika pelaksanaan pilkada dapat disosialisasikan secara baik maka akan terwujud pilkada yang mendapatkan partisipasi masyarakat yang cukup besar. Persepsi mahasiswa ini juga didukung dengan adanya konsekuensi dampak globalisasi yang antara lain:

1. *Decisional impacts*; yang menyebabkan terjadinya perubahan preferensi kebijakan menjadi lebih akomodatif terhadap keadaan sosial masyarakat.
2. *Institutional impacts*; yang menuntut pembaharuan institusi untuk menyesuaikan tantangan globalisasi serta konflik institusional.
3. *Structural impacts*; yang menyebabkan perubahan struktur, pola politik dan pola masyarakat domestik.<sup>82</sup>

Dengan adanya konsekuensi globalisasi tersebut, maka pelaksanaan pilkada serentak perlu dipertahankan. Hal ini mengingat besarnya pemahaman baik terhadap pilkada serentak tersebut, dan potensi besarnya partisipasi masyarakat untuk ikut memilih menurut penulis dapat memberikan legitimasi politik yang kuat bagi pemimpin kepala daerah. Kekuasaan yang legitim seringkali dapat dijalankan dengan efektif dan stabil. Mengapa? karena, pemimpin yang legitim menjalankan kekuasaan berdasarkan kehendak rakyat yang dipimpinnya.<sup>83</sup> Dengan begitu, banyaknya suara pemilih merupakan gambaran

---

<sup>82</sup>Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet pertama, hlm. 117

<sup>83</sup>Rafael Ragan Maran, *Op.Cit.*, hlm. 191

dari partisipasi aktif masyarakat dalam perpolitikan di daerah dapat melahirkan pemerintahan daerah yang baik.

Responden juga menilai dengan pelaksanaan pilkada serentak, pemerintah yang melaksanakan pilkada bisa lebih hemat, selain itu dana yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan pilkada juga dapat menjadi lebih hemat, sehingga bisa dikatakan pilkada serentak adalah lebih efektif baik dari segi waktu pelaksanaan serta dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pilkada yang sebelumnya hampir setiap tahun di berbagai daerah dilakukan maka hampir setiap tahun juga pemerintah mengeluarkan dana untuk sosialisasi dan biaya lainnya, sedangkan jika pilkada dilaksanakan serentak pada beberapa daerah serta dilaksanakan serentak baik pemilihan kepala daerah tingkat I dan II, pemerintah selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dapat menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada serentak.

Responden juga menilai dengan pelaksanaan pilkada serentak, masyarakat hanya perlu meluangkan waktu satu kali untuk memilih Pemimpin daerah provinsi maupun pemimpin daerah kabupaten kota. Selain itu, dengan dilakukan serentak pada beberapa daerah, euforia keramaian pilkada tidak terjadi setiap tahun, sehingga suasana kehidupan sosial masyarakat dapat lebih kondusif. Tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya persepsi sebaliknya, dengan pelaksanaan pilkada serentak, pemerintah dikhawatirkan menjadi kurang fokus untuk mengontrol kondusifitas masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pilkada di

---

beberapa daerah secara bersamaan. Menurut asumsi penulis, dengan dilakukannya pilkada secara serentak, lembaga Komisi Pemilihan Umum ataupun Panitia Pengawas Pemilu harus menyesuaikan diri dan menjawab keraguan masyarakat yang mengkhawatirkan tidak fokusnya pelaksanaan pengawasan pemilukada dengan meningkatkan kapasitas pengawasan.

Hasil laporan pelaksanaan pilkada dan laporan hasil wawancara sebagaimana terdapat pada matrix kedua menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi sebagian besar responden yang mengatakan bahwa dengan pilkada serentak partisipasi warga untuk memilih akan lebih besar dengan data hasil pelaksanaan pilkada di Kota Banjarmasin yang menunjukkan jumlah partisipasi pemilih di Kota Banjarmasin terbilang rendah. Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu rendahnya kesadaran warga mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, serta dapat diakibatkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan untuk menarik minat warga pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.